

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Ayat-ayat Al-Qur'an Berkenaan dengan Penelitian

Audit merupakan proses mengevaluasi bahan bukti terhadap suatu kegiatan yang bertujuan agar dapat menentukan kriteria perbaikan terhadap keadaan pada proses kegiatan tersebut dan hasilnya nanti berupa rekomendasi perbaikan. Menurut M. Quraish Shihab dalam buku Tafsir Al-Mishbah, terdapat ayat Al-Quran yang membahas tentang menganjurkan melakukan perbaikan. Seperti yang terdapat pada Surah Asy-Syu'ara ayat 150-152:

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (١٥٠) وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (١٥١) الَّذِينَ يَفْسِدُونَ
فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (١٥٢)

Artinya:

“Maka bertakwalah kepada Allah dan patuhilah aku, dan janganlah kamu menaati perintah para pelampau batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan.”

Dari ayat diatas, dilihat dari kata (**المُسْرِفِينَ**) *al-musrifin* yang berarti pelampauan batas. Yang dimaksud dengan pelampauan batas itu bahwa telah dilakukan berkali-kali atau berkesinambungan. Dan kata (**يَفْسِدُونَ**) *yufsidun* yang berarti merusak. Kata ini berfungsi untuk menjelaskan makna kata pelampauan batas tersebut. Dalam kata ini ditampilkan dalam bentuk kata kerja *mudhari'* (masa kini dan datang) untuk mengisyaratkan perusakan yang dilakukan

berkesinambungan. Perusakan adalah aktivitas yang mengakibatkan sesuatu yang memenuhi nilai-nilainya atau berfungsi dengan baik serta bermanfaat menjadi kehilangan sebagian atau seluruh nilainya, sehingga tidak atau berkurang fungsi dan manfaatnya, akibat ulah si perusak. Sedangkan dari penyebutan kata (لا يصلحون) *la yushlihun* yang artinya mereka tidak mengadakan perbaikan atau membiarkannya tetap rusak, setelah sebelumnya telah ditegaskan bahwa mereka membuat kerusakan. Perusakan adalah lawan dari kata perbaikan. Jika demikian mengapa ayat tersebut masih mencantumkan kalimat “mereka tidak mengadakan perbaikan?”. Dari kata *yushlihun* yang digunakan pada ayat ini yang artinya memperbaiki (Shihab Quraish, 2002, p. 112). Sehingga dapat diartikan bahwa terdapat penganjuran dalam melakukan perbaikan terhadap masalah atau kerusakan sehingga nilai-nilai yang ada menjadi baik dan bermanfaat sebagaimana keadaan semula.

Dari ayat tersebut telah ditegaskan bahwa perlu diadakannya atau dianjurkan untuk melakukan suatu perbaikan terhadap sesuatu yang rusak atau belum baik. Sehingga nilai-nilai atau proses yang telah ada dapat menjadi lebih baik pengelolaannya dan dapat lebih bermanfaat. Oleh karena itu, ayat tersebut sesuai dengan audit yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu melakukan evaluasi terhadap suatu kegiatan guna untuk menjadi bahan acuan perbaikan.

2.2 Audit

Audit merupakan proses mengevaluasi bahan bukti mengenai pernyataan terhadap suatu kegiatan yang bertujuan agar dapat menentukan kriteria perbaikan terhadap keadaan pada proses kegiatan tersebut dan hasilnya nanti berupa

rekomendasi perbaikan yang akan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan (Mulyadi, 2012, p. 9). Audit adalah proses untuk memperoleh/ menilai bukti tentang kegiatan (operasi) suatu organisasi atau perusahaan (*auditee*) apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan kriteria atau kebijakan yang telah ditetapkan. Meskipun tujuan audit, ruang lingkup, pelaporan tipe audit berbeda-beda, pada dasarnya bukti audit lapangan merupakan dasar penting bagi pernyataan pendapat (opini) maupun temuan/rekomendasi. Namun pada dasarnya audit adalah aktivitas pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait suatu informasi untuk menentukan dan membuat laporan tentang tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan.

Menurut *American Accounting Association* (AAA) dalam *Accounting Review*, vol 47 mendefinisikan auditing sebagai berikut “Suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah diciptakan sebelumnya serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Auditing adalah suatu proses yang sistematis, artinya berupa serangkaian prosedur yang logis, terstruktur, terencana, terorganisir dan memiliki tujuan.

Berdasarkan dari beberapa pendapat ahli mengenai audit, penulis menyimpulkan bahwa audit dilakukan untuk memastikan apakah pengendalian intern yang telah ada sudah memadai dan dapat mengurangi resiko yang dihadapi. Proses sistematis secara objektif diakumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan.

1.2.1 Fungsi Audit

Sebagaimana diketahui bahwa akuntansi bukanlah suatu tujuan bagi organisasi, tetapi hanya sebagai sebuah sistem atau alat komunikasi antara data-data keuangan dan hasil operasi organisasi dalam bentuk laporan keuangan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan harus dapat memenuhi kebutuhan para pemakainya dalam mengambil keputusan ekonomi sehingga informasi yang ada didalamnya harus dapat dipercaya, andal, relevan, dan tepat waktu penyajiannya. Untuk itu diperlukan jaminan bahwa sebuah laporan keuangan dihasilkan dari sistem akuntansi yang dijalankan sesuai dengan standar, kriteria, dan peraturan-peraturan yang ada. Lebih lanjut, diperlukan pihak ketiga independen untuk memberikan penilaian atas kewajaran sebuah laporan keuangan. Pihak independen tersebut adalah auditor independen tersebut adalah fungsi dari auditing. Yakni untuk menentukan apakah sebuah laporan keuangan telah memenuhi pedoman kriteria, standar dan sesuai dengan peraturan serta prinsip akuntansi yang berterima umum (Gondodiyoto, 2019a, p. 115). Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi auditing adalah berfungsi untuk meningkatkan atau menurunkan tergantung dari pendapat yang diberikan oleh akuntan-derajat kepercayaan pemakai laporan keuangan atas asersi-asersi yang ada dalam sebuah laporan keuangan.

1.2.2 Bahan Audit

Didalam melakukan audit banyak hal yang harus dilakukan dan salah satunya yaitu bahan dalam melakukan audit (Gondodiyoto, 2019a, p. 590). Dijelaskan jenis bahan bukti yang dapat dikategorikan dengan beberapa cara didalam melakukan audit yaitu sebagai berikut:

1. Bukti langsung/tidak langsung, dimana bukti langsung adalah bukti audit bersifat fakta atau dokumen sah yang langsung terkait dengan kegiatan pemeriksaan. Contohnya ialah sertifikat hak milik tanah jika auditor menguji keabsahan kepemilikan tanah *auditee* atau biaya pos tertentu berupa bukti pembelian dan pembayaran sah aslinya. Sedangkan bukti tidak langsung ialah bukti yang harus disimpulkan sendiri oleh auditor berdasarkan bahan bukti tertentu.
2. Bukti utama (primer/sekunder), dimana bukti utama ialah misalnya surat perjanjian atau kontrak, surat konfirmasi asli tentang piutang dari pelanggan rekening koran dari bank. Sedangkan bukti sekunder ialah bila surat-surat tersebut bukan yang asli melainkan *copy* dan bahan kadang-kadang sudah dengan coretan/tanda/tambahan dengan pena tulisan tangan. Jadi menggunakan bukti sekunder untuk menarik konklusi memerlukan keyakinan auditor bahwa *copy* tersebut valid (sesuai dengan aslinya).
3. Faktor/bukti hasil analisis. Kesimpulan auditor yang didasarkan bukti audit yang berasal dari hasil pemikiran yang terkait dengan kenyataan atau fakta yang relevan.
4. *Record/Testimonial Evidence*. *Record evidence* itu sendiri yaitu bukti audit yang berwujud dokumentasi/catatan meliputi surat-surat perjanjian atau kontrak, notulen rapat dll yang dapat dianggap sebagai bukti audit. Yang pihak atau orang tertentu, dalam bentuk tertulis maupun lisan (atau bersifat hasil analisis). Bukti ini dapat diperoleh melalui beberapa cara yaitu hasil wawancara, surat atau konfirmasi dari pihak lain, *observation evidence* dan *analytical evidence*.

Dari bahan-bahan bukti yang dijelaskan diatas maka banyak yang perlu diperhatikan lagi dalam melaksanakan audit salah satunya teknik pemeriksaan. Terdapat berbagai teknik pemeriksaan yang bisa diterapkan dalam melaksanakan audit. Teknik-teknik pemeriksaan tersebut antara lain ialah observasi, wawancara, tanya jawab, kuesioner, konfirmasi, inspeksi, analisis, perbandingan, pemeriksaan bukti-bukti tertulis atau studi dokumentasi (*vouching* dan *verifikasi*), rekonsiliasi, trasis (*tracing*), perhitungan ulang (*re-computation*) dan *scanning*.

1.3 Audit Sistem Informasi

(Zuraidah, 2020b, p. 3). Audit sistem informasi dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti untuk menilai apakah sistem komputer dapat menjaga asset menjaga integritas dan menjamin tercapainya tujuan organisasi dengan efektif dan penggunaan sumber daya dengan efisien. Berdasarkan definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa tujuan audit sistem informasi adalah untuk meningkatkan pengamanan terhadap asset, meningkatkan integritas data dan meningkatkan efektivitas dan efesiensi.

1.3.1 Tujuan Audit Sistem Informasi

Tujuan dari adanya audit sistem informasi untuk memastikan apakah sistem informasi telah dirancang dan diterapkan sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan (Arens, 2015, p. 289). Tujuan audit system informasi secara keseluruhan antara lain:

1. Pengamanan Asset. Asset yang harus dilindungi dan dijamin keamanannya dari gangguan pihak yang tidak bertanggung jawab yaitu asset informasi yang berupa software, hardware, SDM, data dan beberapa fasilitas lainnya.

2. Efektifitas Sistem. Untuk memastikan keefektifitasan sistem informasi maka sistem informasi tersebut harus dirancang dengan baik dan benar sesuai dengan kebutuhan user. Karena efektifitas suatu sistem sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan suatu perusahaan.
3. Efisiensi Sistem. Suatu system dikatakan efisien apabila sistem telah sesuai dengan kebutuhan user dengan minimnya kapasitas sumberdaya informasi.
4. Ketersediaan. Ketersediaan layanan teknologi dapat mendukung proses bisnis berkelanjutan.
5. Kerahasiaan. Memaksimalkan perlindungan terhadap informasi dari pengaksesan pihak yang tidak bertanggung jawab
6. Keandalan. Pengelolaan organisasi, pengelolaan laporan dan pertanggung jawaban pihak manajemen harus maksimal, akurat dan sesuai.
7. Menjaga integritas data. Menjaga dan melindungi integritas data perusahaan berdasarkan kebenaran, kelengkapan dan keakuratan data itu sendiri.

2.3.2 Tahapan Audit Sistem Informasi

Untuk melaksanakan audit sistem informasi, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan (Gondodiyoto, 2019a). Tahapan-tahapan tersebut ialah:

1. Tahap pemeriksaan pendahuluan, dalam tahap ini, auditor melakukan audit terhadap susunan, struktur, prosedur, dan cara kerja komputer yang digunakan perusahaan. Di dalam tahap ini, auditor dapat memutuskan untuk meneruskan audit atau mengundurkan diri/menolak meneruskan auditnya. Namun, jika audit sudah terlanjur dilaksanakan, auditor dapat memberikan pendapat kualifikasi.

2. Tahap pemeriksaan terperinci, dapat dilakukan jika auditor memutuskan untuk melanjutkan auditnya. Dalam tahap ini, auditor berupaya mendapatkan informasi secara lebih mendalam untuk memahami pengendalian yang diterapkan dalam sistem komputer klien. Auditor harus dapat memperkirakan bahwa hasil audit pada akhirnya harus dapat dijadikan sebagai dasar untuk menilai apakah struktur pengendalian internal yang diterapkan dapat dipercaya atau tidak memadai atau tidaknya pengendalian tersebut akan menjadi dasar bagi auditor dalam menentukan langkah selanjutnya.
3. Tahap pengujian kesesuaian adalah untuk mengetahui apakah struktur pengendalian internal yang ditetapkan telah diterapkan dengan sebagaimana mestinya atau tidak.
4. Tahap pengujian kebenaran bukti adalah untuk mendapatkan bukti yang cukup kompeten sehingga auditor dapat memutuskan apakah risiko yang material dapat terjadi atau tidak selama pemrosesan data di komputer. Pada tahap ini pengujian yang dilakukan adalah mengidentifikasi kesalahan dalam pemrosesan data, menilai kualitas data, mengidentifikasi inkonsistensi data, membandingkan data dengan perhitungan fisik, mengkonfirmasi data dengan sumber-sumber dari perusahaan.
5. Tahap penilaian secara umum atau hasil pengujian. Pada tahap ini auditor diharapkan telah dapat memberikan penilaian apakah bukti yang diperoleh dapat atau tidak mendukung informasi yang diaudit. Hasil penilaian tersebut akan menjadi dasar bagi auditor untuk menyiapkan pendapatnya dalam laporan audit.

1.4 COBIT 5

COBIT yaitu penduan praktik manajemen TI serta kumpulan dokumentasi framework tatakelola TI dalam melakukan pemahaman dan manage risiko, manfaat dan evaluasi TI oleh auditor (Gondodiyoto, 2019b, p. 275). COBIT dirilis pada tahun 1996 dan yang terakhir dirilis pada tahun 2012 yaitu COBIT 5.

COBIT 5 adalah *a set of best practice (framework)* bagi pengelolaan teknologi informasi (*IT management*) yang secara lengkap terdiri dari, *executive summary, framework, control objectives, audit guidelines, implementation tool set* dan *management guidelines* yang sangat berguna untuk proses system informasi strategis.

Berdasarkan jurnal (ISACA, 2012), ada 5 prinsip dasar pada COBIT 5, yaitu:

1. *Meeting Stakeholder Needs* (Prinsip 1). Melakukan pengoptimalan terhadap risiko keamanan informasi dan penggunaan sumberdaya guna menciptakan nilai yang baik kepada stakeholdernya oleh perusahaan
2. *Covering the Enterprise End-to-End* (Prinsip 2). Yaitu Melakukan pengintegrasiaan *IT enterprise* pada organisasi pemerintah oleh COBIT 5
3. *Applying a Single, Integrated Network* (Prinsip 3). Bisa menggunakan *framework* lain sesuai kebutuhan
4. *Enabling a Holistic Approach* (Prinsip 4). COBIT 5 dapat menjelaskan kumpulan penyebab atau yang biasa disebut enabler dalam mensupport penerapan pemerintahan ataupun perusahaan TI yang bersifat menyeluruh.

5. *Separating Governance from management* (Prinsip 5). Pemerintah dan manajemen memiliki kegiatan yang berbeda dan dapat dibedakan oleh COBIT 5.

Pada COBIT 5 terdapat 5 domain yang terdiri dari 32 proses antara lain:

1. *Align Plan and Organise* (APO), berupa penyelarasan TI yang dapat membantu dalam pencapaian tujuan bisnis. Terdapat 13 subdomain yang terdapat pada domain APO ini, antara lain:
 - a. *APO01. Manage the IT Management Framework*
 - b. *APO02. Manage Strategy*
 - c. *APO03. Manage Enterprise Architecture*
 - d. *APO04. Manage Innovation*
 - e. *APO05. Manage Portfolio*
 - f. *APO06. Manage Budget and Cost*
 - g. *APO07. Manage Human Resources*
 - h. *APO08. Manage Relationship*
 - i. *APO09. Manage Service Agreements*
 - j. *APO10. Manage Supplier*
 - k. *APO11. Manage Quality*
 - l. *APO12. Manage Risk*
 - m. *APO13. Manage Security*
2. *Build Acquire and Implement* (BAI), Domain ini meliputi membangun, memperoleh dan mengimplementasikan TI yang kemudian diubah menjadi bentuk layanan strategis IT. Ada 10 subdomain yang terdapat pada domain BAI ini, antara lain:

- a. BAI01. *Manage Programmes and Project*
 - b. BAI02. *Manage Requirements Definition*
 - c. BAI03. *Manage Solutions Identification*
 - d. BAI04. *Manage Availability and Capacity*
 - e. BAI05. *Manage Organisational Change Enablement*
 - f. BAI06. *Manage Changes*
 - g. BAI07. *Manage Changes Acceptance and Transitioning*
 - h. BAI08. *Manage Knowledge*
 - i. BAI09. *Manage Assets*
 - j. BAI10. *Manage Configuration*
3. *Deliver Service and Support (DSS)*, Membahas tentang support layanan yang diperlukan (pengelolaan keamanan, dukungan terhadap layanan pengguna, pengendalian layanan keamanan dan layanan pengelolaan data).
Ada 6 subdomain pada domain DSS ini, antara lain:
- a. DSS01. *Manage Operation*
 - b. DSS02. *Manage Service Requets and Incidents*
 - c. DSS03. *Manage Problems*
 - d. DSS04. *Manage Continuity*
 - e. DSS05. *Manage Security Services*
 - f. DSS06. *Manage Business Process Controls*
4. *Monitoring Evaluation and Assess (MEA)*, Berkaitan terhadap pengawasan evaluasi serta penilaian manajemen terhadap pengelolaan proses. Ada 3 subdomain pada domain MEA ini, antara lain:

- a. MEA01. *Monitor Evaluated and Assess Performance and Conformance*
 - b. MEA02. *Monitor Evaluated and Assess System of Internet Control*
 - c. MEA03. *Monitor Evaluates and Assess Compliance with External Requirements*
5. *Evaluated Direct and Monitor (EDM)*, Berkaitan terhadap tujuan stakeholder untuk membuat suatu penilaian, optimalisasi yang berupa kegiatan dengan tujuan melakukan evaluasi terhadap strategi dan arahan kepada pihak pemangku kepentingan utama. Ada 5 subdomain pada domain EDM ini ialah:
- a. EDM01. *Ensure Governance Framework Setting and Maintenance*
 - b. EDM02. *Ensure Benefit Delivery*
 - c. EDM03. *Ensure Risk Optimisation*
 - d. EDM04. *Ensure Resource Optimisation*
 - e. EDM05. *Ensure Stakeholder Transparency*

1.4.1 *Capability Level*

Capability level merupakan sebuah parameter pengukuran untuk menentukan suatu nilai terhadap level yang mampu dicapai oleh suatu organisasi (Zuraidah, 2020a, p. 37). Dimensi kapabilitas menyediakan ukuran kemampuan proses untuk memenuhi tujuan bisnis saat ini atau yang diproyeksikan untuk proses tersebut (ISACA, 2012). Adapun tingkatan *Capability level* sebagai berikut:

1. Proses tidak lengkap (*Incomplete Process*) Level 0. Prosesnya tidak menggapai tujuan

2. Proses teratur (*Performed Process*) Level 1. Prosesnya mencapai tujuan atau berhasil.
 - a. PA 1.1 Proses kinerja (*Process Performance*), suatu pengukuran untuk melihat apakah pencapaian tersebut terbukti dan valid.
3. Level 2 Proses dikelola (*Manage Process*). Mengelola proses yang telah ada sebelumnya dengan cara direncanakan, dipantau dan disesuaikan).
 - a. PA 2.1 *Performance Management*, Mengukur terhadap pengendalian kinerja
 - b. PA 2.2 *Work Product Management*, Mengukur hasil kinerja yang dari proses dikelola
4. Level 3 Proses ditetapkan (*Established Process*). Pengendalian dan penerapan suatu proses yang sudah ada dan yang saat ini agar dapat dilihat proses dengan hasil yang maksimal.
 - a. PA 3.1 Proses Definisi: Mengukur proses yang dikelola
 - b. PA 3.2 Proses Penyebaran: Mengukur proses dijalankan untuk menggapai hasil yang maksimal
5. Level 4 Proses dapat diramalkan (*Predictable Proces*). Proses yang sudah ada dan saat ini dijalankan berdasarkan batasan.
 - a. PA 4.1 Proses Pengukuran: Pengukuran untuk memastikan bahwa proses sudah mencapai tujuan
 - b. PA 4.2 Proses Kontrol: Pengukuran proses agar stabil dan mampu meramalkan batasan
6. Level 5 Proses dioptimalkan (*Optimizing Process*). Pengoptimalan proses saat ini untuk meningkatkan tujuan bisnis sekarang dan akan datang

- a. PA 5.1 Proses Inovasi: Mengukur perubahan proses yang telah dianalisis
- b. PA 5.2 Proses Optimisasi: Mengukur perubahan untuk didefinisikan supaya memiliki hasil yang efektif.

Berikut ini tabel skala dalam menentukan tingkat *Process Capability Level*:

Tabel 2.1 Skala Index Capability

Level Pembulatan	Tingkat Capability
4.51 – 5.00	5- <i>Optimising Process</i>
3.51 – 4.50	4- <i>Predictable Process</i>
2.51 – 3.50	3- <i>Established Process</i>
1.51 – 2.50	2- <i>Managed Process</i>
0.51 – 1.50	1- <i>Performed Process</i>
0.00 – 0.50	0- <i>Incomplete Process</i>

Sumber: Jurnal Informasi dan Komputer tahun 2019

Rumus:

$$Capability\ level = \frac{(0 * y_0) + (1 * y_1) + (2 * y_2) + \dots (5 * y_5)}{z}$$

Keterangan:

y_n = Jumlah proses pada level n

z = jumlah proses yang dievaluasi

1.4.2 RACI Model

RACI adalah singkatan dari *Responsible, Accountable, Consulted, Informed*. COBIT 5 menerangkan bahwa RACI *chart* berfungsi untuk menunjukkan peran dan tanggung jawab suatu fungsi dalam organisasi terhadap suatu aktivitas tertentu dalam *IT control objective* (ISACA, 2012). Peran dan tanggung jawab merupakan duahal yang sangat berkaitan erat dengan proses pembuatan keputusan. Suatu keputusan dapat dibuat oleh pihak-pihak yang

memang memiliki kewenangan sebagai pembuat keputusan.

RACI diterapkan pada setiap aktivitas didalam *IT control objective* untuk mendukung kesuksesan proses TI pada keempat domain. Tujuan dari pemberian peran dan tanggung jawab ini adalah untuk memperjelas aktivitas, sekaligus sebagai sarana untuk menentukan peran dan fungsi-fungsi lainnya terhadap suatu aktifitas tertentu.

RACI *chart* mendefinisikan apa dan kepada siapa yang harus didelegasikan, terdiri dari:

1. R (*Responsible*), artinya pihak yang harus memastikan aktivitas tersebut berhasil dilaksanakan.
2. A (*Accountable*), artinya pihak yang mempunyai kewenangan untuk menyetujui atau menerima pelaksanaan aktivitas.
3. C (*Consulted*), artinya pihak yang mana pendapatnya dibutuhkan dalam aktivitas (komunikasi arah).
4. I (*Informed*) artinya pihak yang selalu menjaga kemajuan informasi atas aktivitas yang dilakukan (komunikasi satu arah).

RACI *chart* ini membantu auditor untuk mengidentifikasi siapa saja yang akan diwawancarai. Dalam COBIT 5 terdapat 12 peran yang dimasukkan kedalam RACI *chart* sebagai:

1. *CEO (Chief of Executive Officer)*
2. *CFO (Chief of Financial Officer)*
3. *Business Executive*
4. *CIO (Chief of Information Officer)*
5. *Business Process Owner*
6. *Head Operations*
7. *Chief Architect*
8. *Head Development*

9. *Head IT Administration*
10. *PMO (Project Manager Officer)*
11. *Compliance, Audit, Risk and Security*
12. *Service Manager*

Pedoman mengenai partisipan dalam penelitian diangkat dari standarisasi ISACA yang disebut RACI. RACI merupakan susunan jabatan yang bisa dijadikan pedoman dalam memilih partisipan penelitian.

1.5 *E-Learning*

Istilah *E-Learning* kini semakin banyak dipakai seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi Internet untuk penyampaian materi pembelajaran. Salah satu definisi umum dari *E-Learning* diberikan oleh, yaitu: pengiriman materi pembelajaran melalui media elektronik seperti Internet, intranet/ekstranet, radio, TV, CD ROM, dll.

E-Learning menunjuk pada pengiriman materi pembelajaran kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun dengan menggunakan berbagai teknologi dalam lingkungan pembelajaran yang terbuka, fleksibel, dan terdistribusi. Lebih jauh, istilah pembelajaran terbuka dan fleksibel merujuk pada kebebasan peserta didik dalam hal waktu, tempat, kecepatan, isi materi, gaya belajar, jenis evaluasi, belajar kolaborasi atau mandiri.

1.6 Penelitian Terdahulu

Jelvino dan Johanes Fernandes Andry (2017), dengan judul “Audit Sistem Informasi Absensi pada PT. Bank Central Asia Tbk menggunakan COBIT 4.1”.
Audit Sistem Informasi Absensi Pada PT. Bank Central Asia Tbk Menggunakan

Cobit 4.1 sudah dilakukan walaupun masih belum berjalan secara optimal karena belum mencapai pada tingkat kematangan yang diharapkan. Tingkat kematangan (*maturity level*) yang ada pada setiap proses TI yang terdapat dalam *sub-domain* AI4 dan DS4 masih dibawah 3 yaitu 2.25 dan 2.4 pada level *Repeatable but Intuitive* & untuk sub domain DS1, DS5, DS10 dan ME2 sudah pada level 3 yaitu *Defined Process*.

Eva Zuraidah (2018), dengan judul “Audit Sistem Informasi Inventory Pada Pt. DSSS dengan menggunakan framework Cobit 4.1”. Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan Analisa apakah proses bisnis bagian inventory Pt. DSS sudah sesuai dengan SOP yang ada di perusahaan. Dalam penelitian ini digunakan alat penelitian kuesioner COBIT 4.1. Dalam mengelola data digunakan *Microsoft Excel 2007*. Adapun domain COBIT 4.1 yang pakai pada penelitian ini antarlain domain PO dan ME, dengan dibatasi subdomain PO6, PO7, ME1, ME2, ME3, ME4. Adapun hasil rata-rata pengolahan kuesioner untuk domain PO dan ME yaitu 2,55 dari rentan nilai 0-5. Dari hasil Pt. DSS telah menerapkan system informasi inventory dengan baik.

Mustofa & Handani (2017) yang berjudul “Pengukuran Kinerja Sistem Informasi Tata Kelola Keuangan Kantor Kecamatan Kemranjen Kab. Banyumas menggunakan framework Cobit 5.0 pada domain MEA (*Monitor Evaluated and Assess*). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pengukuran capability level pada proses tatakelola keuangan. Dalam penelitian ini, peneliti memakai framework cobit 5 domain MEA. Dalam penelitian ini menghasilkan hasil berupa rekomendasi pada masalah yang ditemukan serta subdomain yang digunakan terdapat pada level *repeatable*.

AR. Anggun Cahyaningtyas, dkk (2012), dengan judul “Audit Sistem Informasi dengan ITIL version 3 Subdomain *Service Desk, Incident Mangement, dan Problem Management* di bidang keuangan Dishubkombudpar Kota Salatiga”. Bahwasannya di dishubkombudpar telah mengimplementasikan sistem informasi pelaporan keuangan daerah (SIPKD). Berdasarkan penelitian ditemukan beberapa temuan dengan tingkat resiko tinggi dimasa depan jika tidak ditangani. Hasil temuan tersebut memberikan rekomendasi kepada dishubkombudpar kota salatiga sebagai objek utama dari DPPKAD Kota Salatiga sebagai subjek pendukung.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilaksanakan oleh penelitian sebelumnya. Maka perbedaan yang dimiliki dan diusulkan oleh penulis yaitu Audit sistem informasi menggunakan COBIT 5 pada *E-Learning* Universitas Muhammadiyah Palembang, dimana metode analisis data yang akan digunakan yaitu *action research*. Audit yang dilakukan dengan menggunakan domain DSS yang memiliki 6 proses dan yang nantinya hasil temuan daru audit ini berupa rekomendasi yang akan diberikan kepada *E-Learning* UMP.